**Utang Indonesia Disorot Dunia, Ini Jawaban Sri Mulyani**

****

http://www.inilahjambi.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG\_20180322\_123840.jpg

JAKARTA — Utang pemerintah Indonesia terus merangkak naik. Nilai utang yang mendekati angka Rp4.000 triliun yang kerap disebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu memang masih jauh di bawah ambang batas rasio utang, namun mulai disorot dunia.

“Membangun ekonomi diibaratkan seperti Anda maraton, bukan seperti lomba lari sprint. Tetapi pelari juga harus dapat menambah kecepatan dalam setiap kilometernya,” kata Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati, dalam acara *High-Level International Conference* di Jakarta, Selasa.

Saat itu, Sri Mulyani ditanya oleh Presenter and *Executive Producer Channel NewsAsia*, Chloe Cho, tentang keadaan utang pemerintah Indonesia yang perlahan meningkat. Maksud Menkeu, pemerintah sadar betul akan risiko mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan utang dapat membahayakan.

Namun, penggunaan utang diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan, yang mana saat ini ekonomi Indonesia sangat membutuhkannya. “Utang hanya *counter cyclical* bagi kami [ekonomi Indonesia],” imbuhnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis/JIBI, posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun, atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Sementara itu, jika melihat dari rasio utangnya hanya 29,1%, yang mana masih dalam *range* yang diizinkan oleh UU keuangan negara pasal 12 ayat 3, maksimum 60% terhadap PDB.

Walaupun demikian, utang pemerintah perlahan mulai terkerek naik, dan hari ini, Selasa (27/2/2018), pemerintah juga kembali melakukan lelang SUN dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2018 dengan target Rp17 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan peningkatan utang negara merupakan respons dari dampak shock di luar negeri yang membuat harga komoditas jatuh, lalu melemahkan perdagangan luar negeri. “Di saat tersebutlah pemerintah masuk, dengan meningkatkan belanjanya [yang bersumber dari utang],” katanya.

Namun hal yang paling penting, kata Sri Mulyani, adalah konsep perbaikan ekonomi yang diusung oleh pemerintah saat ini adalah dengan meningkatkan belanja infrastruktur, dan edukasi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih mumpuni.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pemerintah aktif dalam menerbitkan banyak kebijakan yang membuat kinerja ekonomi semakin banyak menarik. “Contohnya, EODB kami membaik, rangking *comptitiveness* *index* kami naik, kami juga mendapat perbaikan peringkat utang jangka panjang dari seluruh *rating agency*, ini semua progres dari kerja kami selama ini,” jelasnya.

**Sumber:**

http://www.solopos.com/2018/02/27/utang-indonesia-disorot-dunia-ini-jawaban-sri-mulyani-898422

**Catatan:**

* Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
* Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. (*https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html*)